

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA



BADAN PUSAT STATISTIK





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.



METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang



Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

• DOMAIN •	• ASPEK & INDIKATOR •									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Validata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaat an <i>Big Data</i>

Keterangan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2023 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	1,78	2,29	2,51	1,77	2,01	1,66	1,88
Domain Prinsip SDI	1,81	2,45	2,49	1,63	2,10	1,68	1,91
Domain Kualitas Data	1,70	2,22	2,51	1,84	1,87	1,57	1,80
Domain Proses Bisnis Statistik	1,82	2,31	2,74	1,84	1,99	1,69	1,83
Domain Kelembagaan	1,85	2,36	2,55	2,00	2,09	1,72	1,96
Domain Statistik Nasional	1,74	1,97	2,15	1,76	1,99	1,65	1,89



2 HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2023

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meliputi:

- Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kubu Raya
- Pemutakhiran Data Dasar Rumah Tangga Kabupaten Kubu Raya

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,21
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,91
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,67
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,29



Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot ¹	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	1,00
Metadata Statistik	25%	1,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	1,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	1,00
Akurasi	16%	1,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	1,00
Aksesibilitas	21%	2,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	1,00
Pengumpulan Data	26%	1,00
Pemeriksaan Data	21%	1,00
Penyebarluasan Data	21%	1,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,75
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,34
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,66

Keterangan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain



KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki keunggulan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interopabilitas Data, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk masih kurang. Hanya sebagian produsen data yang telah menunjukkan adanya penerapan Prinsip Satu Data Indonesia.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun dokumen kebijakan terkait penerapan Prinsip Satu Data Indonesia ke seluruh produsen data dan memastikan penerapan dari kebijakan tersebut.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki keunggulan pada Domain Kualitas Data karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Aksesibilitas masih berpredikat Cukup, karena baru dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing
- Penerapan pada Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualisasi dan Ketepatan Waktu, serta Keterbandingan dan Konsistensi berpredikat Kurang karena baru diterapkan oleh sebagian produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun suatu standar baku terkait penerapan Aspek Aksesibilitas dan diimplementasikan kepada seluruh produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun suatu standar baku terkait penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, serta Keterbandingan dan Konsistensi, serta diimplementasikan kepada seluruh produsen data.



3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki keunggulan pada Domain Proses Bisnis Statistik karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data masih kurang. Hanya sebagian produsen data yang telah menunjukkan adanya Proses Bisnis Statistik.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun dokumen kebijakan terkait penerapan proses bisnis statistik ke seluruh produsen data dan memastikan penerapan dari kebijakan tersebut.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Kelembagaan terkait kolaborasi antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan secara formal berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait penyelenggaraan forum SDI telah dilaksanakan oleh walidata Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pengesahan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut.
- Penerapan Aspek Kelembagaan terkait kolaborasi dengan pembina data statistik Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan BPS secara formal dalam Forum SDI.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas masih kurang. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 527/BAPPEDALITBANG/2022 tentang Daftar Data Sektoral dan Data Geospasial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 dan SS Data Publik dan *Private*, namun kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh seluruh produsen data.
- Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel masih berpredikat Cukup. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah ikut serta dalam Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, namun tidak menunjukkan adanya pemenuhan kompetensi di bidang statistik dan bidang manajemen data yang menyeluruh secara kelembagaan, contohnya melalui analisis beban kerja untuk fungsional statistisi dan pranata komputer.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait pelaksanaan tugas sebagai walidata masih berpredikat Cukup. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan walidata dan tugasnya berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya



Nomor 617/Diskominfo tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, namun tidak dilaksanakan seluruhnya.

Rekomendasi:

- Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 527/BAPPEDALITBANG/2022 tentang Daftar Data Sektoral dan Data Geospasial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 dan SS Data Publik dan *Private* perlu dilakukan oleh seluruh produsen data dan dipastikan sudah diimplementasi dengan baik dan benar.
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu mempertimbangkan untuk menambah pegawai yang memang memiliki spesifikasi di bidang statistika.
- Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 617/Diskominfo tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah perlu dilakukan oleh seluruh produsen data dan dipastikan sudah diimplementasi dengan baik dan benar.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait penggunaan data statistik dasar dan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan secara formal berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait penyebarluasan data statistik melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sudah dilakukan evaluasi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait sosialisasi dan literasi data statistik, dan pengelolaan kegiatan statistik berpredikat Kurang karena tidak dilaksanakan oleh produsen data.
- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik terkait pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik berpredikat Kurang karena tidak dilaksanakan oleh produsen data.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait perencanaan pembangunan statistik dan pemanfaatan *big data* berpredikat Kurang karena tidak dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan tidak adanya bukti rencana aksi.

Rekomendasi:

- Penerapan aspek pemanfaatan data statistik terkait sosialisasi dan literasi data statistik, dan pengelolaan kegiatan statistik perlu dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan dipastikan sudah diimplementasikan dengan baik dan benar.
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun laporan rencana aksi dan laporan pelaksanaan penerapan aspek penguatan SSN berkelanjutan terkait perencanaan pembangunan statistik dan pemanfaatan *big data*.



3 TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	1,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	1,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	1,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	60%	1,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	1,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	1,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	1,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	2,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	1,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	1,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	1,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	1,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	1,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	1,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	2,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	1,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	1,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Keterangan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli